

Kabupaten Ketapang – Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Barat, terletak di antara garis 0° 19' 00" - 3° 05' 00" LS dan 108° 42' 00" - 111° 16' 00" BT. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai, yang merupakan muara sungai, berupa rawa – rawa. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau, Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Karimata, Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur: Berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang. Daerah Kabupaten ketapang mempunyai luas wilayah 35.809 Km² (± 3.580.900 Ha) yang terdiri dari 33.209 Km² wilayah daratan dan 2.600 Km² wilayah perairan. Kecamatan: Benua Kayong, Air Upas, Delta Pawan, Hulu Sungai, Jelai Hulu, Kendawangan, Manis Mata, Marau, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Nanga Tayap, Pemahaman, Sandai, Simpang Dua, Simpang Hulu, Singkup, Singkup, Sungai Laur, Sungai Melayu Raya, dan Tumbang Titi

Sebagian besar Kab Ketapang sudah mengembangkan dan melaksanakan KTSP, meski hanya mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Namun ada juga sekolah di daerah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten yaitu kecamatan nanga tayap yang masih menggunakan kurikulum 1994. hal ini dikarenakan sekolah itu termasuk daerah pelosok. Sedangkan PAUD memang belum ada landasan hukumnya untuk mengembangkan KTSP, namun pada acara ini kelompok PAUD sangat antusias sekali mengikuti kegiatan.

Pihak dinas berupaya keras agar semua sekolah yang berada di lingkungan kabupaten Ketapang dapat melaksanakan KTSP. Untuk itu Kepala Dinas menghimbau agar peserta yang hadir untuk optimal mengikuti kegiatan.

Semua peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan sangat antusias. Hal ini tidak dapat ditemui oleh penulis di daerah lain. Mereka saling mengisi dan bekerja sama selama kegiatan. Semua permasalahan dapat diselesaikan bersama. Sehingga setiap kelompok memiliki percaya diri selama pelatihan.

Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali.

Kabupaten Sambas – Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan antar negara yaitu antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk sampai diperbatasan diperlukan waktu 2 Jam melalui darat. Daerah ini merupakan daerah pertanian. Waktu tempuh sekitar 6 jam darat dari kota Pontianak. Semula ini merupakan Kota kabupaten dengan ibu kota Singkawang. Kemudian daerah tersebut dimekarkan dan singkawang berdiri sendiri.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sambas. Kegiatan dibuka oleh kepala Dinas. Kebijakan daerah untuk satuan pendidikan semua SD sudah

melaksanakan/menerapkan KTSP masuk tahun ke dua begitu juga untuk SMP untuk SMA dan SMK belum semua menerapkan KTSP dan untuk SLB Belum, mereka masih mengumpulkan informasi. Dari SLB menanyakan KTSP-nya, masing-masing jenis kelainan, atau model lain.

Selama kegiatan berlangsung baik dan juga didukung oleh panitia/pihak sekolah. Ruang yang digunakan ruang kelas. Dan saat kegiatan kelompok dalam pendampingan memakai beberapa ruang Kelas.

Kegiatan ditutup oleh Kabid Dikmen, beliau merasa senang dan pola-pola yang disampaikan akan dikembangkan, dan berharap kegiatan pendampingan seperti ini perlu diteruskan sehingga sekolah dapat mengembangkan programnya maksimal. Hasil dari kegiatan tersebut berupa KTSP dan model silabus dari masing-masing satuan pendidikan, program TPK ke depan, juga hasil isian format pendampingan yang isinya antara lain permasalahan yang berkenaan dengan penyusunan KTSP, Kendala dalam pelaksanaan, solusi yang diberikan oleh kelompok, juga saran yang diberikan oleh tim pendamping.

Kabupaten Sintang – Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota Sintang. Secara geografis wilayah Kabupaten Sintang di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serawak (Malaysia Timur), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah barat berbatasan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi. Wilayah Kabupaten Sintang dilalui Sungai Kapuas yang melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang dan Kentungau, sedangkan Sungai Melawi melewati kota Sintang, Dedai, sampai Ambalau dan menuju ke Propinsi Kalimantan Timur. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Sintang dapat ditempuh melalui transportasi darat dengan kendaraan Bis Malam. Sebenarnya untuk mencapai wilayah Kabupaten Sintang dapat dilalui dengan pesawat terbang karena memiliki Bandar Udara, namun sudah beberapa tahun tidak beroperasi lagi.

Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 1-5 Desember 2008, bertempat di Aula Kampus STAN (Yayasan Melati Sintang), Jalan M. Saad No. 3, Sintang 78611, Provinsi Kalimantan Barat.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan.

Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang, ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain:

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor 136 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008.

Hasil workshop, meliputi:

Identifikasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok

Analisis Dokumen KTSP (SMP dan SDLB),

Action Plan dari masing-masing kelompok

Analisis data pre-post tes serta

umpan balik dari peserta

Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena Kabupaten Sintang telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sejak tahun 2007 dan sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan sudah menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah SK TPK Kabupaten Sintang yang masih ditandatangani oleh Kepala Dinas, belum ditetapkan melalui SK Bupati.

Kabupaten Bangli - Provinsi Bali

Kabupaten Bangli terletak diantara 115' 13' 48" sampai 115' 27' 24" Bujur Timur dan 8' 8' sampai 8' 31' 87" Lintang Selatan. Posisinya berada ditengah-tengah Pulau Bali sehingga merupakan satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki pantai/laut.

Luas Kabupaten Bangli sebesar 520,81 Km atau 9,25% dari luas Propinsi Bali, ketinggian dari permukaan laut antar 100 – 2152 meter sehingga tanaman apa saja bias tumbuh di daerah ini. Secara fisik dibagian Selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Propinsi sekitar 40 km. Luas wilayah yang ada sekitar 2.855 Ha. Kabupaten Bangli sebagian besar daerahnya merupakan dataran tinggi.

Batas Wilayah Kabupaten Bangli

Sebelah Utara:Berbatasan dengan Kabupaten Buleleng

Sebelah Timur:Berbatasan dengan Kabupaten Karangasem

Sebelah Barat:Berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Badung

Sebelah Selatan:Berbatasan dengan Kabupaten Gianyar Luas 520,81 km²

Jumlah Penduduk 197.210 jiwa dengan kepadatan 378,6 jiwa/km²

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan TPK yang berlangsung di Kabupaten Bangli sebenarnya telah mengalami beberapa kali pemunduran jadwal .Tanggapan pemerintah Kabupaten Bangli sendiri cukup baik. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kaitannya dengan peserta; sebagian kecil nampak kurang antusias dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan. Terkesan para peserta kurang konsentrasi, banyak yang tidak hadir. Bagi mereka yang hadir mengikuti kegiatan, mereka sering meninggalkan kegiatan dengan alasan tertentu; misalnya mengikuti kegiatan di kabupaten, mengikuti upacara adat ngaben, dan

sebagainya. Sejumlah peserta terasa kurang yakin terhadap realisasi peran TPK Kabupaten dalam oprasionalisasinya ke depan. Nampaknya masih belum ada kesadaran dari pihak dinas bahwa TPK merupakan kebutuhan mereka dan bukan kebutuhan Puskur, oleh karena itu mereka masih mengharap-harap bantuan lagi dari Puskur. Hal ini dapat dipahami karena dari apa yang dialami dan diceritakan peserta bahwa dari yang sudah-sudah sejumlah perencanaan kandas ditengah jalan. Jaringan Kurikulum yang pernah ada hilang begitu saja. Untuk itu TPK Kabupaten Bangli perlu penguatan-penguatan , dukungan-dukungan baik dari Pusat maupun daerah yang dapat memberikan keyakinan dan semangat pada anggota TPK pada keberadaan dan peran TPK dalam menyebarkan dan memberikan bantuan teknis kepada Satuan Pendidikan dan guru di lapangan.

Dalam verifikasi surat keputusan yang berhubungan dengan keberadaan dan peran keanggautaan TPK Kabupaten Bangli semula ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan ditingkatkan menjadi keputusan Bupati, dan usulan inipun disepakati oleh Kepala Dinas Kabupaten Bangli. Dalam hal penyampaian materi pada saat pelatihan berlangsung proses pemahaman berlangsung cukup sulit mengingat materi yang diberikan ayng dalam beberapa hal dirasa baru oleh sebagian peserta.

Kabupaten Alor – Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 20 Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Timur, letaknya bagian utara dan ujung timur NTT. Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 20 pulau, 9 pulau yang telah dihuni penduduk, yakni : Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Pura, Pulau Tereweng, Ternate, Kepa, Pulau Buaya, Pulau Kangge dan Pulau Kura. 11 Pulau lainnya tidak berpenghuni, masing-masing, Pulau Sikka, Pulau Kapas, Pulau Batang, Pulau Lapang, Pulau Rusa, Pulau Kambing, Pulau Watu Manu, Batu Bawa, Pulau Batu Ille, Pulau Ikan Ruing dan Pulau Nubu. Sebagai daerah kepulauan paling timur NTT, Kabupaten Alor berbatasan Timur dgn wilayah kepulauan Maluku Tenggara Baratdengan Selat Lomblen Kabupaten Lembata Utara dengan Laut Flores,danSelatan dengan Selat Ombay dan Timor Leste.

Jenis tanah di Kabupaten Alor termasuk Vulkanik muda sehingga kaya unsur hara, struktur tanah gembur dan subur. Solum tanah sedang sampai dalam, sehingga tanah lebih stabil, dengan kemampuan menahan air tinggi dan dapat diusahakan berbagai jenis tanaman. Luas wilayah daratan 2.864,64 Km² dan luas perairan 10.773,62 Km², panjang garis pantai 287,10 km. Kondisi geografi Kabupaten Alor berkonfigurasi bergunung-gunung dan memberikan variasi iklim yang berbeda, dan sangat menguntungkan bagi daerah dan rakyat dalam pengembangan tanaman produksi. Penerbangan yang hanya ada 1 hari 1 kali dengan tengang waktu begitu pendek membuat frekwensi bantuan dari luar daerahpun menjadi sedikit pula.

Pelatihan dan pendampingan pada TPK Kabupaten Alor dilakukan dalam rangka memberikan penguatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sebagaimana diketahui , bahwa sejauh ini secara formal Pusat Kurikulum belum pernah melakukan pendampingan pada Kabupaten Alor, meskipun demikian memang tidak tertutup kemungkinan bahwa di hampir setiap anggota TPK Kabupaten Alor telah

mendapat informasi tentang KTSP dari berbagai sumber baik itu yang dari sumber yang relevan atau tidak, berkewenangan atau tidak. Kondisi ini dapat dianggap sebagai kondisi saat ini yang berlaku dimana pemahaman yang dimiliki peserta sangat beragam. Hal ini dapat diketahui tentang pemahaman mereka tentang komponen-komponen KTSP yang dipersepsikan secara amat beragam. Pemahaman muatan lokal diartikan sebagian kelompok sebagai yang tidak menentukan kenaikan kelas dan pengembangan diri sebagai contohnya diartikan sebagai turut menentukan kenaikan kelas. Demikian juga tentang pemahaman 8 standar belum sepenuhnya dipahami oleh TPK Kabupaten Alor. Pada umumnya pemahaman mereka tentang KTSP pun baru sebatas kopi paste belaka. TPK Kab Alor ditetapkan dalam surat keputusan Bupati. Permasalahan lain dalam pengembangan kurikulum di daerah Kab Alor ialah kecepatan mereka mengakses informasi yang seperti yang berkenaan dengan buku elektronik maupun maupun informasi lainnya di bidang pendidikan.

Disamping itu medan yang kurang menguntungkan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi proses penyebaran KTSP pada satuan pendidikan. Penyebaran bagaimana pelaksanaan KTSP harus dilakukan dan seyogyanya itu diikuti dengan monitoring dan bantuan supervisi pada satuan pendidikan. Pelatihan dan pendampingan seyogyanya harus diikuti dengan Monitoring dan evaluasi guna melihat sejauh apa program yang dirancang dapat terlaksana. Bantuan berupa bahan-bahan ajar seperti buku teks sebagai sarana minimal belajarpun tidak dapat diakses sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu jika pada masa mendatang hendaknya dibuka kemungkinan agar tim bantuan teknis tidak sekedar membawa bahan-bahan teknis model yang teoritis saja namun perlu dibawakan bahan2 dasar guna menunjang proses pembelajaran. Standar Nasional Pendidikan, Buku elektronik, model kurikulum dan SKKNI, buku –buku pendidikan khusus dan TK/PAUD akan menjadi bahan atau oleh-oleh yang sangat diharapkan oleh pelaksana pendidikan di Kabupaten Alor.

Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Penguatan TPK dan Pendampingan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten pada satuan pendidikan di Muara Beliti Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Juni – 4 Juli 2008

Standar isi yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar bersama standar kompetensi lulusan telah disebarkan melalui berbagai media cetak dan elektronik serta berbagai institusi turut serta mensosialisasikan standar nasional pendidikan. Penyusunan dan Implementasi delapan standar dari standar nasional pendidikan sudah tentu memerlukan proses dan waktu dalam penerapannya dan sudah itu hasilnya pun belum tentu memberi pemahaman yang sama kepada pelaku pendidikan sebagai pelaksana operasional dalam system pendidikan. Gaung Standar Nasional Pendidikan seyogyanya dapat didengar, dilihat, dipahami dan diterapkan dalam tingkat satuan pendidikan yang paling pelosok sampai pada tataran pembelajaran sesungguhnya dimana guru dan siswa berinteraksi dalam proses internalisasi nilai pendidikan yang bermuara pada siswa sebagai pelaku utama sekaligus target pendidikan.

Sebagai daerah pengembangan baru Musi Rawas yang baru berusia sekitar 5 tahun berpenduduk sekitar lebih kurang 200.000 orang sebenarnya telah mempunyai asset

yang cukup baik dan memadai dalam hal sumberdaya alam yang ada serta Sumber Daya Manusianya, tingkat kemakmuran penduduk pun pada tingkat yang berimbang dimana tidak adanya pengemis di Musi Rawas, dan ini cukup memadai untuk menunjang perkembangan pendidikan yang berkualitas pada masa-masa yang akan datang. Dalam segi SDM nya jika dilihat dari komposisi Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Musi Rawas hampir semua tim pengembang kurikulum yang berjumlah 50 orang berlatar belakang pendidikan S1 atau 47 (94%) orang tenaga pengembang Kurikulum adalah berlatar belakang pendidikan S1 terlepas dari disiplin ilmu yang dimilikinya. Sedangkan dari 33 orang hanya 32 (97%) orang guru Sekolah Menengah (SMA & SMK) dan Kepala sekolah berlatar belakang pendidikan S1. Dari 23 orang guru SMP ada 20 (87%) orang guru berlatar belakang pendidikan S1.

Pada pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Khusus masih dirasakan kurang bahkan sangat minim dimana masing-masing jenjang dan jenis pendidikan ini hanya memiliki 1 orang guru yang berlatar belakang S1. Namun demikian berdasarkan pada pengamatan tim Puskur pada kegiatan Pendampingan oleh TPK Musi Rawas pada satuan pendidikan dilihat dari segi kompetensi gurunya dalam berinteraksi ketika diskusi dan pelatihan penulisan naskah KTSP, silabus dan RPP hampir semua peserta (TPK Musi Rawas) mempunyai kemampuan menerima dan melatih kembali materi yang diberikan secara baik. Yang menjadi masalah ialah sulitnya akses informasi yang mereka terima dari Pusat maupun dari beberapa sumber.

Keterbatasan sumber bacaan sebagai acuan kerja guru di semua jenjang dan jenis pendidikan dirasakan sangat minim adanya. Program-program Kejuruan yang terstandar sedikit sekali yang mereka miliki.

Keberadaan SKKNI (Standar Kompetensi Kejuruan Nasional Indonesia) yang dibawa oleh Pusat Kurikulum sangat memberi arti bagi keberlangsungan pendidikan Kejuruan di Musi Rawas. Akses para guru mendapatkan buku elektronik pun sebagai bahan ajar mengalami kesulitan.

Dalam pengembangan model kurikulum mungkin tidak bermasalah, namun menjadi bermasalah ketika mereka hendak mengembangkan program-program pembelajaran pada masa-masa setelah pelatihan usai. Untuk itu Pusat Kurikulum pada program pendampingan mendatang lebih baik juga menyiapkan buku-buku elektronik sebagai bahan ajar yang telah di rekam melalui CD untuk disebarkan pada sekolah-sekolah di daerah pendampingan disamping bahan-bahan pengembangan kurikulum yang dimiliki oleh Pusat Kurikulum.

Kelengkapan dan paduan antara materi pendampingan yang mencakup implementasi 8 standar yang dicontohkan dalam model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dimiliki oleh Pusat Kurikulum dengan bahan ajar merupakan pasangan bahan pendampingan yang ideal dalam Pendampingan Pengembangan KTSP oleh TPK Kabupaten/Provinsi pada Satuan Pendidikan. Dua kegiatan (pemahaman pada TPK dan pendampingan pada Satuan Pendidikan) yang dilakukan dalam selang waktu yang sama ada baiknya, namun perlu dipikirkan keterbatasan waktu yang tersedia demi tercapainya efektifitas program pendampingan itu sendiri.

Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Penguatan TPK dan Pendampingan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten pada satuan pendidikan di Muara Beliti Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Juni – 4 Juli 2008

Standar isi yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar bersama standar kompetensi lulusan telah disebarakan melalui berbagai media cetak dan elektronik serta berbagai institusi turut serta mensosialisasikan standar nasional pendidikan. Penyusunan dan Implementasi delapan standar dari standar nasional pendidikan sudah tentu memerlukan proses dan waktu dalam penerapannya dan sudah itu hasilnya pun belum tentu memberi pemahaman yang sama kepada pelaku pendidikan sebagai pelaksana operasional dalam system pendidikan. Gaung Standar Nasional Pendidikan seyogyanya dapat didengar, dilihat, dipahami dan diterapkan dalam tingkat satuan pendidikan yang paling pelosok sampai pada tataran pembelajaran sesungguhnya dimana guru dan siswa berinteraksi dalam proses internalisasi nilai pendidikan yang bermuara pada siswa sebagai pelaku utama sekaligus target pendidikan.

Sebagai daerah pengembangan baru Musi Rawas yang baru berusia sekitar 5 tahun berpenduduk sekitar lebih kurang 200.000 orang sebenarnya telah mempunyai asset yang cukup baik dan memadai dalam hal sumberdaya alam yang ada serta Sumber Daya Manusianya, tingkat kemakmuran penduduk pun pada tingkat yang berimbang dimana tidak adanya pengemis di Musi Rawas, dan ini cukup memadai untuk menunjang perkembangan pendidikan yang berkualitas pada masa-masa yang akan datang.

Dalam segi SDM nya jika dilihat dari komposisi Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Musi Rawas hampir semua tim pengembang kurikulum yang berjumlah 50 orang berlatar belakang pendidikan S1 atau 47 (94%) orang tenaga pengembang Kurikulum adalah berlatar belakang pendidikan S1 terlepas dari disiplin ilmu yang dimilikinya. Sedangkan dari 33 orang hanya 32 (97%) orang guru Sekolah Menengah (SMA & SMK) dan Kepala sekolah berlatar belakang pendidikan S1. Dari 23 orang guru SMP ada 20 (87%) orang guru berlatar belakang pendidikan S1. Pada pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Khusus masih dirasakan kurang bahkan sangat minim dimana masing-masing jenjang dan jenis pendidikan ini hanya memiliki 1 orang guru yang berlatar belakang S1.

Namun demikian mendasarkan pada pengamatan tim Puskur pada kegiatan Pendampingan oleh TPK Musi Rawas pada satuan pendidikan dilihat dari segi kompetensi gurunya dalam berinteraksi ketika diskusi dan pelatihan penulisan naskah KTSP, silabus dan RPP hampir semua peserta (TPK Musi Rawas) mempunyai kemampuan menerima dan melatih kembali materi yang diberikan secara baik. Yang menjadi masalah ialah sulitnya akses informasi yang mereka terima dari Pusat maupun dari beberapa sumber. Keterbatasan sumber bacaan sebagai acuan kerja guru di semua jenjang dan jenis pendidikan dirasakan sangat minim adanya. Program-program Kejuruan yang terstandar sedikit sekali yang mereka miliki. Keberadaan SKKNI (Standar Kompetensi Kejuruan Nasional Indonesia) yang dibawa oleh Pusat Kurikulum sangat memberi arti bagi keberlangsungan pendidikan Kejuruan di Musi Rawas. Akses para guru mendapatkan buku elektronik pun sebagai bahan ajar mengalami kesulitan. Dalam pengembangan model kurikulum mungkin tidak bermasalah, namun menjadi bermasalah ketika mereka hendak mengembangkan

program-program pembelajaran pada masa-masa setelah pelatihan usai. Untuk itu Pusat Kurikulum pada program pendampingan mendatang lebih baik juga menyiapkan buku-buku elektronik sebagai bahan ajar yang telah di rekam melalui CD untuk disebarakan pada sekolah-sekolah di daerah pendampingan disamping bahan-bahan pengembangan kurikulum yang dimiliki oleh Pusat Kurikulum. Kelengkapan dan paduan antara materi pendampingan yang mencakup implementasi 8 standar yang dicontohkan dalam model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dimiliki oleh Pusat Kurikulum dengan bahan ajar merupakan pasangan bahan pendampingan yang ideal dalam Pendampingan Pengembangan KTSP oleh TPK Kabupaten/Provinsi pada Satuan Pendidikan. Dua kegiatan (pemahaman pada TPK dan pendampingan pada Satuan Pendidikan)yang dilakukan dalam selang waktu yang sama ada baiknya, namun perlu dipikirkan keterbatasan waktu yang tersedia demi tercapainya efektifitas program pendampingan itu sendiri.

Kabupaten Flores Timur - Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara geografis wilayahnya berupa kepulauan yang terletak di ujung timur Pulau Flores. Wilayah Kabupaten Flores Timur sebagian berada di daratan Pulau Flores bagian timur dan beberapa pulau di sekitarnya, antara lain pulau Adonara dan Solor. Wilayah Kabupaten Flores Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Flores Timur dapat ditempuh dengan transportasi udara atau laut. Transportasi udara dengan pesawat dapat dicapai melalui Kota Kupang dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, namun jadwal penerbangan Kupang-Larantuka masih sangat kurang dan hanya tersedia pada hari-hari tertentu, yaitu Selasa, Kamis dan Sabtu.

Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 17-21 Nopember 2008, bertempat di Aula SMAN 1 Larantuka, Jalan Diponegoro, Batuata, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Flores Timur, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan.

Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur, ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain:

Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPK Kabupaten Flores Timur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor: 65 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten Flores Timur.

Hasil workshop, meliputi:

- Analisis Dokumen KTSP (SMP dan SDLB),
- Action Plan dari masing-masing kelompok
- Identifikasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok
- Analisis data pre-post tes serta umpan balik dari peserta

Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena Kabupaten Flores Timur telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sejak tahun 2007 dan sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan sudah menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah SK TPK Kabupaten Flores Timur yang masih ditandatangani oleh Kepala Dinas, belum ditetapkan melalui SK Bupati.

Kabupaten Jembrana - Provisi Bali

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Secara geografis luas wilayah Kabupaten Jembrana 14,94 persen dari luas pulau Bali dengan jumlah penduduk 263.791 jiwa pada tahun 2007.

Kebijakan pendidikan dibawah pimpinan Bupati I Gede Winasa, sangat patut diteladani dengan konsep dan komitmen pada program pendidikan yang berpihak kepada masyarakat. Hal ini terlihat dengan program jangka pendek, menengah, dan panjang. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Jembrana ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 16-20 September 2008, bertempat di SMPN 1 Negara, Jembrana Bali.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan.

Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain:

Surat Keputusan (SK) Bupati Jembrana Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kabupaten Jembrana Tahun 2008.

Hasil workshop, meliputi:

- Identifikasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok
- Analisis Dokumen KTSP (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK),
- Action Plan dari masing-masing kelompok

Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena semua pihak sangat responsive, bijak, terbuka, dan demokrasi hal ini terlihat dari awal pertemuan dengan didahului pemantapan TIM TPK yang lama dan yang sekarang dengan SK Bupati. Sebagian TPK sudah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sejak tahun 2007 dan sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan yang menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Walau demikian masih perlu pemantapan konsep-konsep yang dianggap peserta masih perlu diberikan agar KTSP yang disusun oleh sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kabupaten Tojo Una-Una - Provinsi Sulawesi Tengah

Ampena Kota adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Una Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat. Kabupaten / Kota : Kab.Tojo Una- Una

Nama Resmi :Kabupaten Tojo Una-Una
Ibukota :Ampana
Provinsi :Sulawesi Tengah
Batas Wilayah :Utara: Teluk Tomini
Selatan: Kabupaten Morowali
Barat: Kabupaten Poso dan Teluk Tomini
Timur: Teluk Tomini, Kabupaten Banggai
Luas Wilayah :± 5.721,15 km².
Jumlah Penduduk :99.866 Jiwa (Sensus Penduduk 2000)

Wilayah Administrasi :

Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, Kabupaten Tojo Una-Una perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pejabat baru di sebuah Kabupaten Baru Tojo Una-Una, Drs. Damsik Ladjalani (52 tahun) merasa prihatin dengan keadaan di daerahnya. Selain tingkat rata-rata pendidikan yang jauh tertinggal, pendapatan perkapita ekonomi yang masih rendah, juga pembangunan infra struktur yang menurutnya kurang memadai untuk sarana penduduknya.

Kota Ampana adalah ibu kota kabupaten Tojo Una-Una (Touna) yang berjarak kurang lebih 400 km dari Kota Palu, ibukota provinsi Sulawesi Tengah. Tim Puskur setelah mendarat di Pelabuhan Udara Mutiara berangkat ke Kabupaten Tojo Una-una (kota Ampana) dengan kendaraan travel, waktu yang dihabiskan adalah 12 (dua belas jam), berangkat pkl 13.00 dari Palu sampai di Ampana Kabupaten Tojo Una-una pkl 01.15. Perjalanan dari Palu sampai Poso jalan yang dilalui sempit , berkelok.kelok di daerah pegunungan dan pada beberapa ruas jalan rusak dan bergelombang serta ada 3 tempat yang membuat perjalanan terhenti karena tanah longsor, sehingga menunggu peralatan berat untuk membersihkan dulu jalan agar dapat dilalui oleh kendaraan. Sedangkan

perjalanan dari Poso ke Ampana jalan sempit , banyak berlubang serta pada beberapa ruas jalan tidak jelas apakah yang dilalui itu jalan atau sungai, sehingga perjalanannya pun menjadi lebih lama lagi, karena kendaraan harus berjalan perlahan agar tidak terperosok.

Dari 50 TPK hanya 6 orang yang tidak sarjana, hal ini cukup untuk mengindikasikan bahwa tim ini cukup memadai paling tidak dari segi pengetahuan umumnya tentang pendidikan , bahkan beberapa diantaranya telah menempuh S2 baik dari dalam dan luar negeri. Namun demikian tingkat pemerataan pemahaman KTSP pada di sebagian besar tingkat satuan pendidikan nampaknya belum seperti yang diharapkan. Keterbatasan dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi di Tojo una-una khususnya dalam mendapatkan informasi pendidikan baik itu melalui media elektronik maupun cetak, sehingga bantuan dari Puskur pun nampaknya tidak cukup memadai dalam menunjang proses belajar jika hanya diberikan berupa contoh bagi pengembangan komponen-komponen kurikulum, tetapi bahan ajar , sarana dan prasaranapun pun menjadi penting karena sering menjadi kendala bagi daerah ini guna menjalankan KTSP nya. Untuk itu perlu dirancang oleh Puskur untuk tidak sekedar menyiapkan bahan-bahan model saja dalam pendampingan masa mendatang. Aspek-aspek sarana penunjang seperti buku elektronik , standar nasional pendidikan pun disertakan dan merupakan bagian dari pelatihan dalam pendampingan.

Kabupaten Halmahera Utara – Provinsi Maluku Utara

Ibu kota Tobelo, 138 mil laut dari Kota Ternate
Luas 24.983 km² (total); 19.536,02 km² (laut) dan 5.447,30 km² (darat)
Penduduk
· Jumlah 220.765 jiwa (2005)
· Kepadatan 4 jiwa/km²

Pertambahan

Penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003 tercatat sebanyak 165.326 jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2005 berjumlah 220.765 jiwa.

Kepadatan

Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara secara keseluruhan, maka tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Tobelo yakni 57.42 jiwa/km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Morotai Selatan Barat yakni 24.83 jiwa/km².

Sebaran

Sebaran tertinggi berada di Kecamatan Tobelo (20,72%) sedangkan terendah berada di Kecamatan Malifut (4,69%).

Faktor yang mempengaruhi tidak meratanya sebaran penduduk adalah:

- topografi wilayah
- kurangnya aksesibilitas jalan darat
- peluang ekonomi

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan TPK yang berlangsung di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) berlangsung dengan cukup memadai baik dilihat dari perencanaan maupun pelaksanaannya. Dari berbagai pengamatan yang dilakukan pada dasarnya peserta mempunyai semangat untuk menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena banyak diantara peserta menerima pelatihan KTSP dengan pola dan isi yang mungkin berbeda sehingga ada sedikit perbedaan pemahaman.

Permasalahan utama ialah adanya kesulitan peserta dalam menterjemahkan kompetensi dasar menjadi indikator. Saat ini Kabupaten Halut belum mempunyai Kepala Dinas Pendidikan. Plh Kepala Dinas Pendidikan dilakukan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang agak sulit membuat keputusan. Segala sesuaunya harus dikonultasikan dengan Bupati Halut. Disamping itu ialah teidak adanya kantor yang menetap pada Kantor Dinas Pendidikan Halut, sehingga suatu saat dapat saja jika hendak meninndak lanjuti suatu kegiatan seperti kegiatan Bimtek Puskur ini , kantor Diknas Kabupaten tidak dapat dihubungi , karena kantornya telah pindah. Seringnya berpindah karena tidak mempunyai kantor dinas Pendidikan Kabupaten Hulut mengindikasikan lemahnya pengelolaan sistem administrasi dan sistim pembinaan secara teknis dalam tataran oprasional di sekolah maupun guru-gurunya.

Agar pelaksanaan implementasi KTSP berjalan dengan baik seyogyanya monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus menerus mengingat karena daerahnya cukup terisolir tentunya membutuhkan bantuan yang tidak hanya bersifat bimbingan saja tetapi diikuti juga dengan dukungan sarana dan prasarana seperti buku sebagai bahan ajar dan standar nasional pendidikan. Penjabaran pelatihan dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) kedalam proses pembelajaran sesungguhnya didukung dengan buku elektronik tentunya akan semakin memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang KTSP

Kabupaten Lebak – Provinsi Banten

Kabupaten Lebak, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Provinsi Jawa Barat di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Luas wilayahnya 3.120 km², dan jumlah penduduknya 1,1 juta jiwa (2003).

Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Dari segi akses informasi pendidikan Kabupaten Lebak relatif mudah, sehingga peluang untuk meningkatkan kemampuan baik dalam substansi maupun pengelolaan pendidikan dapat dilakukan dengan relatif mudah.

Pemahaman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan oleh beberapa peserta pada beberapa komponen kurikulum di Kabupaten Lebak masih masih dipandang secara

terpusat sebagaimana pada kurikulum terdahulu. KTSP dalam pelaksanaannya masih dianggap sebagian peserta sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan pada tingkat Pusat. Pihak Dinas nampaknya masih memandang bahwa pembentukan Tim Pengembang Kurikulum tingkat Kabupaten merupakan kebutuhan Pemerintah Pusat (bukan kebutuhan Kabupaten) sehingga nuansa ketergantungan daerah dengan Pusat sangat terasa pada awal-awal Pelatihan dilakukan.

Semangat untuk menghidupkan TPK belum begitu terasa. Meskipun demikian hampir sebagian besar peserta memahami apa dan mengapa KTSP itu meskipun dalam pemahaman yang kurang memadai. Merekapun sudah cukup banyak mendapatkan berbagai pelatihan dari berbagai instansi. Namun demikian dalam pengembangannya belum terlihat pada tataran sekolah dalam hal ini ialah gurunya, hal ini terlihat dari proses pendampingan yang dilakukan TPK pada 100 orang guru dari berbagai jenis jenjang pendidikan, seperti pemahaman indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar seperti yang tercantum dalam standar proses. bahkan beberapa peserta TPK memahami indikator boleh hanya satu dan bahkan ada indikator dijabarkan dari materi atau pembelajaran.

Pemahaman mereka tentang keberadaan 8 Standar Nasional Pendidikan hanya sebatas dapat menyebutkan 8 standar itu, tetapi apa yang termuat dalam standar-standar itu (kecuali standar isi dan standar kompetensi lulusan) tidak dipahami. Ketidak pahaman itu dapat dikarenakan oleh tidak dimilikinya dokumen SNP oleh sebagian besar peserta. Sosialisasi dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan pada TPK seyogyanya dilengkapi dengan pembekalan, pemberian bahan berupa dokumen Standar Nasional Pendidikan, Buku Sekolah Elektronik, SKKNI, Bahan-bahan TK/PAUD, Pendidikan Khusus dan contoh berbagai model pengembangan Kurikulum. Keberadaan bahan ajar pelatihan ini sangat membantu proses pelatihan dalam memahami Kurikulum secara utuh.

Kabupaten Manggarai - Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², termasuk pulau Komodo, dengan penduduk ±600.000 jiwa. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², termasuk pulau Komodo, dengan penduduk ±600.000 jiwa.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur terdiri dari 12 Kecamatan yaitu:
Cibal • Elar • Kota Komba • Lambaleda • Langke Rembong • Mborong • Ponco Ranaka • Reo • Ruteng • Sambu Rambas • Satarmese • Wae Rii

Besarnya Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan kondisi letak geografis dan jumlah penduduk yang cukup besar untuk suatu kabupaten yang menyebar menuntut kekuatan tim kerja yang satu padu dan utuh yaitu dimana TPK untuk mempunyai kemampuan substansi dan daya kerja yang kuat guna dapat memberikan pelayanan pendidikan yang merata bagi tenaga pendidik dan kependidikan. permasalahan Kabupaten Manggarai ialah terbatasnya sumberdaya manusia dan juga ketersediaan sarana dan prasarana baik buku maupun peralatan pada di hampir semua jenis dan jenjang pendidikan yang

memadai guna memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.

Tantangan dunia pendidikan membenteng dihadapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melawan keterbatasan sarana & prasarana guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Pelatihan yang benar-benar mengandalkan komputer baik dalam mengembangkan maupun mendapatkan informasi darinya nampaknya perlu dilihat kembali . Kondisi yang beragam diantara peserta juga mengindikasikan bahwa sebagian peserta belum pernah mendapatkan informasi maupun pemahaman tentang KTSP yang utuh, meskipun pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum pun belum menjawab semua permasalahan yang ada di tingkat satuan pendidikan khususnya dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam komponen-komponen kurikulum yang akan atau sudah dikembangkan di satuan pendidikan.

Strategi penyampaian dan pelatihan dalam bentuk workshop perlu dipikirkan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Kemauan pihak dinas untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum khususnya dalam menangani permasalahan daerahnya secara mandiri perlu direspon dengan memberikan bantuan teknis yang memang belum memadai yang dimiliki oleh TPK Manggarai. Apa yang telah dilakukan Pusat kurikulum mungkin tidak dapat berhenti disitu saja namun harus ada tindak lanjut yang lebih oprasional lagi guna melengkapi kemampuan-kemampuan yang mungkin belum dimiliki sepenuhnya oleh TPK Kabupaten Manggarai. Monitoring dan evaluasi mungkin tidak lagi dilakukan dengan memanggil mereka di tingkat Provinsi, tetapi monitoring dan evaluasi seyogyanya dilakukan oleh Pusat Kurikulum sudah sampai pada tingkat bantuan dan supervisi utuh pada tingkat satuan pendidikan bahkan sampai dengan guru.

Daerah Manggarai mungkin perlu dilihat , dicermati, dibina secara lebih khusus karena alasan keterbatasan itu. Tim Pusat tidak hanya memberikan bantuan-bantuan yang bersifat teoritis lagi tetapi harus sudah pada tataran oprasional memberikan contoh, memberikan pendampingan yang dibutuhkan didaerah dalam menjawab tuntutan implikasi dari implementasi standar nasional pendidikan

Kota Cilegon – Provinsi Banten

Berdasarkan letak geografisnya, berada dibagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi : 5°52'24" - 6°04'07" LS, 105°54'05" - 106°05'11" BT. Secara administratif wilayah berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999, Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang)
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang)
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu (Kabupaten Serang)

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah ± 17.550 Ha terbagi atas 8 Kecamatan berdasarkan Perda No.15 Tahun 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 kecamatan berubah menjadi 8 Kecamatan, yaitu :

Kecamatan Cilegon
Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Cibeber
Kecamatan Grogol
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Citangkil
Kecamatan Jombang

Secara umum fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi telah tersedia di Kota Cilegon walaupun sebarannya relatif belum merata. Untuk fasilitas pendidikan dasar sebarannya hampir merata di setiap kelurahan di Kota Cilegon, namun fasilitas pendidikan menengah ke atas sebarannya relatif belum merata, karena fasilitas tersebut umumnya masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota dan pusat-pusat kecamatan saja.

Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah mengembangkan dan melaksanakannya. Hanya masih banyak yang masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain.

TPK nampak lebih percaya diri karena selama kegiatan KTSP, ditulis sendiri untuk setiap kelompok, lalu dipresentasikan untuk mendapat masukan dari kelompok lain. Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru dan kepala sekolah serius, hanya sebagian pengawas kurang serius dalam mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore.

Kabupaten Banggai Kepulauan - Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang secara geografis wilayahnya berupa kepulauan yang terletak di bagian timur Pulau Sulawesi. Sesuai dengan namanya, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wilayah kepulauan terdiri dari Pulau Peleng (luas 2.340 km²), Pulau Banggai (268 km²), Pulau Bangkurung (145 km²), Pulau Salue Besar (84 km²), Pulau Labobo (80 km²) dan 118 pulau-pulau kecil lainnya. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat ditempuh melalui transportasi laut dengan kapal motor atau ferry dari kota Luwuk (Ibukota Kabupaten Banggai), dengan waktu tempuh selama 4-5 jam namun hanya sekali pada malam hari pukul 20.00 WITA dan sebaliknya dari Salakan (ibukota Kab Bangkep) ke Luwuk pada sore hari pukul 16.00, atau pada hari tertentu ada kapal ferry namun dengan waktu tempuh lebih lama sampai 9-10 jam. Sedangkan untuk mencapai kota Luwuk dapat dilakukan melalui transportasi udara dengan pesawat terbang dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, namun jadwal penerbangan Makassar-Luwuk masih sangat kurang dan sehari hanya tersedia sekali penerbangan. Selain itu, untuk ke Banggai Kepulauan dapat dicapai

melalui jalan darat dari Kota Palu menuju Luwuk.

Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 25-29 Nopember 2008, bertempat di Aula SMPN 1 Tinangkung, Jalan KRI. Imam Bonjol No. 01, Salakan, Telp. (0462) 21712.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan.

Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan menghasilkan beberapa dokumen, antara lain:

Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPK Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 427.5.1093/DIKPORA-BANGKEP/2008 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hasil workshop, meliputi:

- Analisis Dokumen KTSP (SMP dan SDLB),
- Action Plan dari masing-masing kelompok
- Identifikasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok
- Analisis data pre-post tes serta
- Umpan balik dari peserta

Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena beberapa kelompok satuan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan telah memiliki dokumen KTSP, meskipun masih pada taraf adopsi dan adaptasi. Oleh sebab itu, masih perlu diadakan pembinaan dan pelatihan dalam penyusunan KTSP secara kontinyu. Selain itu, TPK Kabupaten Banggai Kepulauan masih ditandatangani oleh Kepala Dinas, namun dijanjikan akan ditindaklanjuti dengan penetapan melalui SK Bupati.

Kabupaten Kaur - Provinsi Bengkulu

Kaur adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia yang Pusat Pemerintahannya terletak di Bintuhan . Kota Kabupaten ini terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, Kaur mempunyai luas tanah sebesar 2.369,05 km² dan dihuni sedikitnya 110.428 jiwa. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Warga Kaur tersebar di 119 desa dan tiga kelurahan dan 4 Kecamatan. Waktu yang diperlukan dalam mencapai jarak tersebut diperlukan 5 – 6 jam dari kota Bengkulu.

Kabupaten Kaur yang baru lahir sekitar 4 – 5 tahun belakangan ini merupakan daerah pengembangan baru yang cukup terisolir dalam jangkauan sosialisasi termasuk dalam mengakses informasi melalui Internet, koran. Namun demikian komunikasi dengan Kaur dari Jakarta tidak begitu bermasalah khususnya dalam komunikasi seluler meskipun terputus-putus, di kota Bintuhan sendiri sebagai Ibukota Kabupaten Kaur masih belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, sehingga kendaraan pengantar maupun penjemput harus menyediakan bahan bakar untuk pulang pergi Bengkulu - Kaur - Bengkulu. Kabupaten Kaur secara umum tidak menunjukkan dinamika ekonomi yang hidup, akses pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) belum ada. Meskipun demikian menurut Kasi Kurikulum Pendidikan menengah ada rintisan untuk lapangan terbang di Kabupaten Kaur sebagai pembuka akses ekonomi dari luar ke Kabupaten Kaur.

Dalam kaitan penerapan KTSP , Kab Kaur pada beberapa peserta telah memahami tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bahkan beberapa peserta baik Tim Pengembang Kurikulum yang berjumlah 50 orang maupun peserta 100 orang yang didampingi TPK dalam memahami KTSP itu telah melaksanakan KTSP. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dikemukakan bahwa hampir semua sekolah telah melaksanakan KTSP, bahkan SMA, SMK dan SLB sudah semua melaksanakan KTSP sedangkan SD hanya 7% saja yang belum mengikuti KTSP, namun demikian pada pelaksanaan pendampingan dan dalam bimbingan teknis oleh Puskur masih sebagian besar peserta belum memahami KTSP itu sendiri, pemahaman mereka terhadap KTSP beragam sekali dari yang tidak mengerti sama sekali (ini porsi terbesar) sampai dengan mengerti sekali (ini porsi sangat kecil). Komposisi TPK 32% (16 orang) bukan sarjana, inipun tentu mempengaruhi kinerja TPK jika tim ini harus bekerja untuk mendampingi 255 sekolah yang terdapat pada Kabupaten Kaur yang guru-gurunya relatif miskin dalam informasi. Kegiatan pendampingan oleh Pusat Kurikulum dilakukan dalam menjawab permasalahan KTSP pada tataran implementasi langsung pada satuan pendidikan .

Sebagaimana diinformasikan oleh pihak Dinas Pendidikan, Kabupaten Kaur belum pernah menerima suatu bentuk pelatihan penyusunan KTSP serinci apa yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum. Pemberian materi oleh institusi lain yang sudah-sudah menurut TPK dan guru-guru yang didampingi TPK Kab Kaur diberikan secara umum dan garis besar sekali, Komponen-komponen kurikulum seperti muatan lokal, penilaian, pengembangan diri dan lainnya tidak tersentuh dalam pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh institusi lain itu. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa waktu yang diberikan dalam suatu pelatihan tidak cukup memadai bagi peserta untuk mengendapkan pemahaman materi yang mereka terima selama pelatihan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusat Kurikulumpun dapat saja berdampak seperti apa yang dilakukan oleh institusi lain di luar Puskur dimana dampak pelatihan tidak terasa oleh TPK maupun guru-guru dan kepala sekolah. Sehingga mereka dapat saja lupa atau melupakan apa yang sudah diberikan. Untuk itu perlu ada pembinaan, monitoring yang berkelanjutan agar KTSP menjadi bagian dari sistem pendidikan di Kabupaten Kaur.

Kabupaten Seluma – Provinsi Bengkulu

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Pemberdayaan daerah atau sekolah ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi dan mutu serta pemerataan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara mandiri. Oleh karena itu melalui kegiatan bantuan teknis TPK dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di jajaran dinas pendidikan dan sekolah dalam rangka melaksanakan Permendiknas. Sehingga diharapkan TPK mampu mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK di Kabupaten Seluma, Bengkulu agar dapat melakukan pembinaan serta pendampingan secara kontinyu kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk dan memantapkan TPK, serta tersusunnya program kerja TPK Kabupaten Seluma. Peserta yang terlibat adalah yang termasuk sebagai TPK sejumlah 50 orang dan satuan pendidikan lainnya sebanyak 100 orang dari jenjang dan jenis PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus.

Kegiatan pendampingan oleh TPK kepada satuan pendidikan di kabupaten Seluma diawali dengan pemberian pre test kepada TPK untuk mengetahui sejauhmana pemahaman TPK mengenai pengembangan kurikulum. Dilanjutkan dengan pemaparan materi secara pleno, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan kerja kelompok menurut jenis satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB. Setelah itu TPK mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Selain itu TPK menyusun rencana tindak (action plan) dan kemudian hasil workshop tersebut di presentasikan oleh masing-masing kelompok.

TPK Kabupaten Seluma sudah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kabupaten Seluma. Dan sementara ini sedang dibuatkan draft agar SK tersebut dapat ditandatangani oleh Bupati. Tim Pengembang Kurikulum sudah sebagian besar paham mengenai pengembangan kurikulum. Dari hasil workshop tentang penyusunan KTSP (silabus dan RPP), RPP yang disusun masih samar-samar, belum terbaca apabila digunakan oleh orang lain. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak semua TPK pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai KTSP. Untuk itu perlu adanya pemerataan bagi yang mengikuti pelatihan atau sosialisai tentang kurikulum dan perlunya penyebaran informasi mengenai kebijakan kurikulum yang terbaru. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya koordinasi antara TPK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dalam hal pengembangan kurikulum.

Kabupaten Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten tersebut telah memekarkan Kota Kupang, sebagai implikasinya pemerintahan kabupaten Kupang pindah kira-kira 30 kilometer dari kota Kupang, termasuk kantor Dinas Pendidikan kabupaten Kupang. Menurut kasi kurikulum, yakni bapak John Geli, tahun 2009 menurut rencana akan pindah ke kantor yang baru bersama-sama dengan kantor dinas yang lain. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pendampingan KTSP masih menggunakan kantor lama yang keberadaannya masih di dalam kota Kupang.

Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah melaksanakan dan memilikinya. Hanya KTSP mereka masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Berkaitan dengan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan tanggal 17 – 21 November 2008 di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, mereka nampak lebih percaya diri karena pelatihan pengembangan KTSP, ditulis sendiri untuk setiap kelompok, lalu dipresentasikan untuk mendapat masukan dari kelompok lain. Selain itu, mereka senang sekali menerima CD dari Puskur.

Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru, kepala sekolah serius, hanya sebagian pengawas kurang serius dalam mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore.

Pemberdayaan TPK kabupaten OKI waktu terlalu singkat untuk menguasai materi bagi pendamping/pelatih pengembang kurikulum, meskipun mereka telah dibekali dengan CD. Karena bagi mereka tidak ada waktu untuk merefleksikan diri atau mengendapkan informasi. Bagi peserta yang dari SMA, SMK, dan SMP masih agak “menguasai” komputer karena umumnya memiliki komputer/laptop, sekurang-kurangnya satu kelompok ada laptopnya, sedangkan SD, SLB, dan PAUD lemah dalam penguasaan komputer. Disamping mereka pada umumnya tidak memiliki laptop.

Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali.

Kabupaten Landak – Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Pontianak sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Sebagai salah satu kabupaten baru, maka pembangunan dalam bidang pendidikan sedang melakukan penataan ke arah pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini tercermin melalui berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah, misalnya membangun sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan mendirikan sekolah baru, serta mengatur pendistribusian guru. Secara kuantitas, jumlah guru yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan masih kurang dilihat dari jumlah sekolah yang ada. SLB baru dirintis pada tahun ini sehingga baik jumlah guru dan peserta didiknya juga masih terbatas.

Kabupaten Landak menjadi salah satu daerah pendampingan yang dipilih oleh Bidang Kurikulum Pendidikan Khusus – Pusat Kurikulum pada tahun 2008 ini, sehingga untuk

provinsi Kalimantan Barat jumlah kabupaten yang dilakukan pendampingan berjumlah 6 kabupaten. Kabupaten Landak termasuk daerah yang mudah dijangkau dari Kota Pontianak dengan jarak kurang lebih 400 km, dan tempuh kurang lebih 5 jam perjalanan darat. Tidak sulit untuk sampai pada kabupaten Landak karena kabupaten ini memiliki potensi sebagai daerah industri, pertanian, dan perkebunan yang menjadi salah satu pemasok pendapatan daerah yang utama.

Kabupaten Landak juga merupakan jalur utama menuju Entikong dan Kuching Malaysia sehingga sangat strategis untuk dikembangkan menjadi daerah transit atau sebagai daerah "Trans Kalimantan Barat". Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan boleh dikatakan sangat tinggi mengingat Bupati Kepala Daerah dan kepala Dinas Pendidikan setempat sangat konsern terhadap kemajuan pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang handal. Guna menciptakan tujuan tersebut, dibentuklah Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dalam rangka menindaklanjuti Permen Diknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 serta perubahannya. Program-program yang mengarah kepada terciptanya kualitas pendidikan juga telah disusun yang salah satunya melalui pengembangan kurikulum dan penerapan kurikulum, memberdayakan guru melalui guru kunjung, bea siswa bagi guru dan siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Semua itu mendapatkan dukungan anggaran APBD yang cukup memadai. Pendirian sekolah-sekolah berstandar nasional (SSN) juga sedang dirintis baik SMP maupun SMA dan SMK.

Potensi TPK kabupaten Landak

Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten Landak masih dalam taraf mengajukan ke Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan secara yuridis. Dilihat dari komposisi TPK (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) yang berjumlah kurang lebih 50 orang, maka yang bertindak sebagai TPK adalah sebanyak 40 orang saja, selebihnya diisi oleh pejabat struktural dan panitia. Latar belakang pendidikan TPK sebagian besar adalah tamatan sarjana (S1) dan didukung oleh anggota TPK dari unsur unsur pengawas. Dilihat dari komposisi dan latar belakang pendidikan TPK, maka dapat diharapkan bahwa pelaksanaan Permen Diknas dapat berjalan sesuai dengan rencana. Karena anggota TPK sendiri diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan.

Sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, dalam pengarahannya Kepala Dinas Pendidikan menaruh harapan banyak kepada TPK bahwa warna pendidikan khususnya di kabupaten Landak menjadi tugas dan tanggung jawab TPK. Artinya mutu layanan pendidikan terletak dipundak TPK sebagai ujung tombak dalam pengelolaan kurikulum dan persekolahan. Kurikulum harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga apa yang dikuasai peserta didik benar-benar menjadi kebutuhannya. KTSP merupakan kurikulum operasional bagi sekolah maka gurulah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan potensi apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan daerah.

Melihat dari komposisi TPK yang sebagian besar berlatar belakang sarjana (S1) tidaklah sulit apabila harapan tersebut dapat tercapai sejalan dengan kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana program kerja Dinas Pendidikan dan TPK. Namun sayangnya harapan yang dituangkan dalam program kerja belum didukung oleh

anggaran daerah sehingga tugas dan fungsi TPK secara organisasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini diakui oleh Dinas Pendidikan setempat bahwa program kerja TPK direncanakan untuk diusulkan ke pemerintah daerah pada tahun 2009 guna mendapatkan pendanaan agar pelaksanaan Permen Diknas Nomor 24 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan khususnya dapat terealisasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya.

Sejalan dengan harapan tersebut, pengarahannya Kepala Dinas Pendidikan setempat memberikan penekanan kepada keberadaan TPK kabupaten agar senantiasa bekerja keras dan memelopori kesuksesan pelaksanaan Permen Diknas tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, serta potensi daerah agar tidak kalah dengan daerah lain.

Kabupaten Belu – Provinsi Nusa Tenggara Timur

Patrisius Asa, Program Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, 21 April 2007, judul penelitian : Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Komisi Pembimbing Ketua: Dr. Gunarianto, SE, M.Si, Anggota: Dra. K. Sulistiyowati, MM.

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Informasi ini dimaksudkan sebagai pemenuhan atas hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam pasal 10 ayat 2 mengamatkan bahwa salah satu tugas dari pejabat pengelola keuangan daerah adalah menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berlandaskan sistem pengelolaan keuangan Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerah, hal tersebut dimaksudkan guna menjadikan tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja keuangan daerah belum dapat dilihat keberhasilan ataupun kekurangannya apabila tidak ada analisis yang memadai, tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan tujuan : 1) Untuk mendapatkan gambaran tentang kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; 2) Untuk mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; 3) Untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; 4) Untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan terhadap pembentukan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan : 1) Tingkat kemandirian untuk mencapai Derajat Desentralisasi Fiskal masih jauh dari harapan atau di bawah rata-rata, namun jika dilihat dari nilai pertumbuhan untuk tahun anggaran 2005 mengalami kemajuan. 2) Penggunaan anggaran atau belanja daerah, selama 3 tahun anggaran yang diteliti TA

2003,TA 2004 dan TA 2005 mengalami kenaikan beban anggaran hal ini terlihat naiknya rasio BAU dan rasio BOP yang merupakan beban tetap yang terus mengalami kenaikan. 3)Pemerintah Kabupaten Belu memiliki kesempatan dan peluang untuk menggunakan dana pinjaman guna membiayai kegiatan pembangunan hal ini tercermin dari DSCR jauh di atas ketentuan PP Nomor 107 yaitu 2,5 kali, hasil penelitian di Kabupaten Belu memiliki DSCR sebesar 63,2 kali.

Saran terhadap hasil penelitian : 1) Target PAD TA 2004 tidak tercapai dan TA 2005 targetnya tidak ditingkatkan, maka sebaiknya diperlukan penelitian tentang potensi PAD secara riil, hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran penerimaan yang jauh dari potensi PAD yang sebenarnya. 2) Melakukan rekayasa anggaran dengan penekanan terhadap anggaran rutin daerah yang meliputi BAU dan BOP. 3) Jika dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Belu dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga guna membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi, untuk hal tersebut diperlukan studi kelayakan agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan.

Kata kunci : kemandirian, efisiensi dan efektivitas, aktivitas APBD, DSCR, serta pertumbuhan APBD.